



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

Nomor : S- 1112 /K/SU/2019 13 Desember 2019  
Lampiran : Dua set  
Hal : Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi  
Madya di Lingkungan BPKP

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju
  2. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
  3. Para Gubernur
- di seluruh Indonesia

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapak/Ibu untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi pengisian jabatan dimaksud. Adapun ketentuan dan persyaratan pendaftaran dapat dilihat dalam Lampiran Surat ini dan diunduh melalui *website* kami di [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).

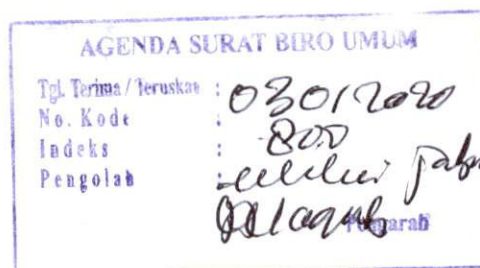
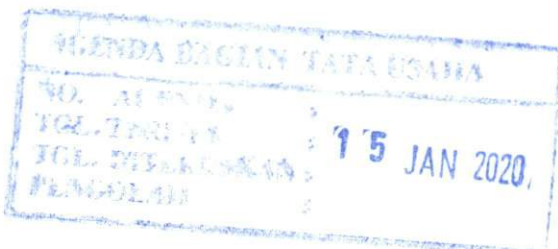
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Pelaksana Tugas Kepala BPKP,

Iswan Elmi

NIP 19600127 198102 1 001



AAO

Lampiran 1  
Surat Nomor S- 1112/K/SU/2019  
Tanggal 13 Desember 2019

### DAFTAR TUJUAN SURAT

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Kementerian Pertahanan
6. Kementerian Sekretariat Negara
7. Kementerian Dalam Negeri
8. Kementerian Luar Negeri
9. Kementerian Agama
10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
11. Kementerian Keuangan
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Kementerian Kesehatan
14. Kementerian Sosial
15. Kementerian Ketenagakerjaan
16. Kementerian Perindustrian
17. Kementerian Perdagangan
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20. Kementerian Perhubungan
21. Kementerian Komunikasi dan Informatika
22. Kementerian Pertanian
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan nasional
27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
31. Kementerian Pariwisata
32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
33. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Inovasi Nasional
34. Kementerian Pemuda dan Olahraga
35. Kantor Staf Kepresidenan
36. Sekretariat Kabinet

37. Arsip Nasional Republik Indonesia
38. Badan Intelijen Nasional
39. Badan Kepegawaian Negara
40. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
41. Badan Koordinasi Penanaman Modal
42. Badan Informasi Geospasial
43. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
44. Badan Narkotika Nasional
45. Badan SAR Nasional
46. Badan Nasional Penanggulangan Bencana
47. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
48. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
49. Badan Pengawas Tenaga Nuklir
50. Badan Pengawas Obat dan Makanan
51. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
52. Badan Pusat Statistik
53. Badan Tenaga Nuklir Nasional
54. Lembaga Administrasi Negara
55. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
56. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
57. Lembaga Sandi Negara
58. Perpustakaan Nasional
59. Badan Pemeriksa Keuangan
60. Badan Standarisasi Nasional
61. Lembaga Ketahanan Nasional
62. Badan Keamanan Laut
63. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
64. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
65. Ombudsman Republik Indonesia
66. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
67. Badan Pengawas Pemilu
68. Komisi Pemberantasan Korupsi
69. Komisi Pemilihan Umum
70. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
71. Badan Ekonomi Kreatif
72. Pemerintah Aceh
73. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
74. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
75. Pemerintah Provinsi Riau
76. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
77. Pemerintah Provinsi Jambi
78. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
79. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung

80. Pemerintah Provinsi Bengkulu
81. Pemerintah Provinsi Lampung
82. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
83. Pemerintah Provinsi Jawa Barat
84. Pemerintah Provinsi Banten
85. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
86. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
87. Pemerintah Provinsi Jawa Timur
88. Pemerintah Provinsi Bali
89. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
90. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
91. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
92. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
93. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
94. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
95. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
96. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
97. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
98. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
99. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
100. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
101. Pemerintah Provinsi Gorontalo
102. Pemerintah Provinsi Maluku
103. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
104. Pemerintah Provinsi Papua Barat
105. Pemerintah Provinsi Papua



## BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

---

PENGUMUMAN  
NOMOR PENG- 2 /PANSELJPTM/BPKP/2/2019  
TENTANG

PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR PENG-1/PANSELJPTM/BPKP/2/2019  
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah di seluruh Indonesia untuk mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka 1 (satu) Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagai Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Persyaratan:

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
2. Kualifikasi pendidikan minimal S1, diutamakan S2 atau S3.
3. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c.
4. Berpengalaman di bidang pengawasan minimal 7 (tujuh) tahun.
5. Berpengalaman penugasan investigatif.
6. Jabatan dan usia:
  - a. Sedang duduk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama minimal selama 2 tahun dan telah lulus Diklat Kepemimpinan Tingkat II; atau
  - b. Sedang duduk dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
  - c. Berusia maksimal 58 tahun per 31 Januari 2020.
7. Diutamakan memiliki TOEFL dengan score 475.
8. Semua unsur Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPK PNS) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir.
9. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik.
10. Sehat jasmani dan rohani.
11. Telah menyerahkan LHKPN dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan satu tahun terakhir.
12. Menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
13. Mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
14. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan atau hukuman pidana, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dua tahun terakhir.
15. Mengikuti uji kompetensi manajerial dan kompetensi bidang/teknis yang diselenggarakan melalui tahapan tes seleksi administrasi, penilaian rekam jejak calon, tes penulisan makalah, *assessment*, tes kesehatan, tes presentasi makalah dan wawancara.

B. Tata Cara Pendaftaran

1. Pendaftaran dilakukan secara daring. Petunjuk pengisian lamaran daring dapat dilihat melalui *website* [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).
2. Lamaran dilengkapi dengan *scan* dokumen sebagai berikut:
  - a. Surat lamaran bermaterai;
  - b. Daftar Riwayat Hidup;

- c. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan atau hukuman pidana, serta tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dua tahun terakhir;
  - d. Surat Pernyataan Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik;
  - e. Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
  - f. Surat Pernyataan Pengalaman Penugasan Investigatif;
  - g. Ijazah terakhir;
  - h. SK Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
  - i. SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
  - j. Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat II;
  - k. Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PPK PNS) dalam 2 tahun terakhir;
  - l. Tanda terima pengiriman LHKPN dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan satu tahun terakhir;
  - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan
  - n. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6.
- Format dokumen butir 2b s.d. 2f dapat diunduh melalui *website* [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).
3. Lamaran harus sudah diterima oleh Panitia Seleksi paling lambat tanggal 27 Desember 2019 pukul 23.59 WIB.

C. Tahapan dan Jadwal

No	Nama Kegiatan	Waktu
1.	Pendaftaran	13 Desember 2019 s.d. 27 Desember 2019
2.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 Desember 2019
3.	Rekam Jejak Kandidat	30 Desember 2019 s.d. 9 Januari 2020
4.	Tes Penulisan Makalah	2 Januari 2020
5.	Assesment dan Tes kesehatan	3 dan 6 Januari 2020
6.	Pengumuman Hasil Penilaian Makalah	7 Januari 2020
7.	Presentasi Makalah dan Wawancara	9 Januari 2020
8.	Pengumuman Hasil Seleksi	13 Januari 2020

Catatan:

1. Bagi peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan penilaian makalah agar menyerahkan dokumen Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada saat akan mengikuti Tahapan Presentasi Makalah dan Wawancara tanggal 9 Januari 2020.
2. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan setiap perubahan jadwal akan diberitahukan kepada peserta melalui email atau *website* [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id).

D. Deskripsi Jabatan

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;

- d. pengoordinasian penyelenggaraan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
  - e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta upaya pencegahan korupsi;
  - f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparat pemerintahan dan badan-badan lainnya;
  - g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
  - h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang keinvestigasian sesuai peraturan perundang-undangan.
- E. Lain-lain
1. Pelamar tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan Panitia Seleksi.
  2. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
  3. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar telah memberikan data/keterangan tidak benar, maka BPKP berhak membatalkan hasil seleksi.
  4. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar.
  5. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2019

PANITIA SELEKSI,  
Ketua,

  
FARID UTOMO